

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat menjadikan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang peneliti ambil di antaranya :

(Riangger et al., 2023) dengan judul “Evaluasi Program desa wisata Candirejo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang”, adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketujuh indikator evaluasi program menurut Kendall (1992), aspek Measurement Result (Pengukuran Hasil), Cost Efficiency (Efisiensi Biaya), Organizational Change (Perubahan Organisasi) dan Unplanned Effect (Efek yang Tak Terencana) sudah tercapai, sedangkan ada tiga aspek yang masih belum optimal yaitu : 1) Pada aspek Goal Achievement (Pencapaian Sasaran) belum tercapai secara optimal dan menyeluruh karena belum sepenuhnya mampu menghapus kemiskinan dan bukan menjadi pekerjaan utama bagi sebagian pelaku wisata karena pendapatan yang tidak stabil; 2) Aspek Measurement of Improvement (Pengukuran Perbaikan), pendidikan wisata di Desa Candirejo masih rendah, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai tujuan desa wisata masih rendah; 3) Aspek Unarticulated Hopes (Harapan yang Tak Terartikulasikan), terdapat harapan pihak pengelola yang belum terealisasi

yaitu terkait peningkatan penghasilan wisata untuk membiayai pendidikan anak-anak Desa Candirejo dan menghapus kemiskinan, kemudian masih terdapat kendala yang dialami saat perjalanan wisata serta adanya kesenjangan musiman dalam sektor pariwisata yang berdampak pada banyaknya wisatawan yang berkunjung.

Kemudian yang kedua, (Wahdan Wilsa et al., 2023) yang berjudul “Evaluasi Program PLP STKIP NU Indramayu Tahun 2023 Dengan Model CIPP”, adapun hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan program PLP berjalan dengan baik sesuai dengan kalender akademik telah ditentukan, 2) Organisasi penyelenggara PPL melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, 3) terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program PLP, 4) visi dan tujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi pedagogic, social, kepribadian, dan professional telah tercermin dalam program PLP 5) hasil penilaian praktik PLP secara umum memperoleh hasil yang baik.

Kemuadian yang ketiga, (Sari, 2022) dengan judul “Evaluasi program Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan objek wisata bakar tongkang”, adapun hasil penelitiannya menunjukan bahwa evaluasi program Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan objek wisata bakar tongkang belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Karena banyak program Dinas tidak dilaksanakan dengan alasan kekurangan dana dari pemerintah pusat,serta terindikasi minimnya pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan objek wisata bakar tongkang.

2.2 Kerangka Konsep Dan Landasan Teori

2.2.1 Konsep Evaluasi

Evaluasi dalam penggunaannya yang paling umum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan nilai (value). Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batas waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus di evaluasi. Untuk dapat mengetahui outcome dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu di implementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang telah panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relative lebih cepat semenjak di terapkannya kebijakan yang bersangkutan (Subarsono, 2005) dalam (Sari, 2022).

Evaluasi ini merupakan umpan balik terhadap apa yang telah dilakukan sehingga bisa menjadi koreksi bagi program, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kesesuaian efektifitas dan efesiensi kegiatan antara perencanaan dan pelaksanaan serta keberhasilan kegiatan (Pantouw et al., 2017). Evaluasi menurut (Kumano,2001) dalam (Sari, 2022) merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan aesmen. Sementara itu menurut (Calongesi, 1995)

dalam (Budiman, 2017) evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan dengan pengertian tersebut, (Zainul dan Nasution, 2001) dalam (Somantri et al., 2023) menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes. (Wulan, 2001) Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa (Purwanto, 2002) dalam (Sari, 2022).

Menurut pendapat dari Dunn (2003) dalam (Sari, 2022) evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam satuan nilainya, dalam arti yang lebih spesifik lagi evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Menurut Ndraha (2011) dalam (Sari, 2022) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Evaluasi dalam evaluasi kinerja (performance appraisal).

Terdapat beberapa model evaluasi, tiga diantaranya adalah :

1. Model *before-after* perbandingan antara sebelum dan sesuatu suatu tindakan (pelaku, treatment), tolak ukurnya adalah before.

2. Model *das dolen-das sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang kenyataannya, tolak ukurnya adalah *das solen*.
3. Model kelompok control-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan dengan kelompok tes diberi perlakuan), tolak ukurnya adalah kelompok control.

Winarno (2012) dalam (Sari, 2022) menyatakan terdapat beberapa tipe evaluasi kebijakan antara lain :

1. Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional
2. Tipe evaluasi yang memfokuskan kebijakan tertentu;
3. Tipe evaluasi kebijakan sistematis.

Suchman dalam (Sari, 2022) lebih lanjut mengemukakan bahwa ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Definisi-definisi terkait dengan evaluasi yang dikemukakan para ahli maka Mutrofin, (2010) dalam (Pratama, 2022) merangkum bahwa untuk mendeskripsikan evaluasi sebagai kerangka umum di dalamnya terdapat makna-makna sebagai berikut:

- a. Evaluasi sebagai judgement professional
- b. Evaluasi sebagai pengukuran
- c. Evaluasi sebagai analisis kesesuaian antara kinerja dengan tujuan, sasaran atau standar kerja
- d. Evaluasi berorientasi pada keputusan
- e. Evaluasi responsif atau bebas tujuan

Evaluasi memungkinkan pelaksana suatu program untuk mengetahui hasil yang nyatanya dicapai. Penilaian yang objektif, rasional dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana akan diketahui apakah hasil yang dicapai melebihi target dan standar yang telah ditentukan, hasil yang dicapai sekadar sesuai harapan, atau kurang dari yang ditentukan (Arikunto dalam (Pratama, 2022).

Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang berbagai objek evaluasi, yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilai dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan sebagai objek evaluasi menurut Wirawan (2011) dalam (Yolanda, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kementerian pariwisata. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Masukan (input) adalah sumber daya dalam bentuk personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, serta bahan yang

digunakan untuk menghasilkan keluaran. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Konsep Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program dengan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Suharsimi Arikunto, 1993) dalam (Pratama, 2022).

Menurut Tyler (1950) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009) dalam (Pratama, 2022), evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program telah terealisasi. mengevaluasi seberapa baik suatu program memberikan hasil atau keuntungan yang diharapkan. Evaluasi dapat mencakup sebagian atau semua aspek implementasi program, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa evaluasi, tidak mungkin untuk mengukur pencapaian tujuan program. Banyak faktor yang saling terkait memengaruhi keberhasilan program dalam mencapai tujuan. Karena seluruh proses program merupakan bagian dari sistem yang utuh, evaluasi program harus dilakukan dengan pendekatan sistem dan berpikir secara sistemik.

Program merupakan rangkaian aktivitas yang berkelanjutan yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan, bukan sekadar kegiatan tunggal yang selesai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, program dapat berlangsung cukup lama. Program biasanya merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dilakukan secara teratur dan terstruktur. Program biasanya dilaksanakan dalam organisasi, yang membutuhkan partisipasi berbagai pihak atau sekelompok individu. Akibatnya, program merupakan bentuk kegiatan terencana yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pelaksanaannya.

Kebijakan umum, dan berbagai jenis program diperlukan untuk melaksanakannya. Setiap program harus dievaluasi untuk memastikan apakah layanan atau intervensi telah mencapai tujuan. Metode sistematis yang dikenal sebagai evaluasi program digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas proses evaluasi merupakan evaluator. Ada banyak jenis, kriteria, dan model evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan evaluasi program berjalan efektif dan tepat sasaran. Evert Vedung dalam (Pratama, 2022) mengemukakan empat kriteria dalam evaluasi program sebagai berikut :

- a. Efektif
- b. Produktivitas

- c. Efisiensi (cost-benefit)
- d. Efisiensi (cost-effectiveness)

Menurut Wirawan (2012) dalam (Pratama, 2022) bagian evaluasi proses (process evaluation) dapat dipergunakan untuk menilai pelaksanaan suatu layanan program, dimana implementasi atau pelaksanaan suatu program akan terlihat dari keseluruhan proses atau serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk mengevaluasi sejauh mana layanan program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, informasi yang dikumpulkan digunakan untuk melakukan evaluasi proses. Data kemudian dianalisis dan dipresentasikan, biasanya dalam bentuk data kualitatif. Meskipun demikian, tujuan evaluasi manfaat adalah untuk memeriksa, menilai, dan menentukan apakah program telah membawa perubahan yang diharapkan. Evaluasi dampak, di sisi lain, berkonsentrasi pada pengaruh jangka panjang dari perubahan tersebut untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan program terhadap sasaran atau lingkungan yang lebih luas.

Dari uraian penjelasan Wirawan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan penilaian, yaitu:

- a. Tahap pertama, pengukuran atau penilaian dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil terhadap kenyataan yang ada di lapangan.
- b. Tahap kedua, perbandingan yang telah diperoleh kemudian disimpulkan dan dikualitatifkan sesuai dengan tujuan penilaian yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut.
- c. Tahap ketiga, meneliti dan menilai dari hasil evaluasi apakah telah memberikan manfaat yang diharapkan.

- d. Tahap keempat, menentukan apakah manfaat memberikan pengaruh melalui pelaksanaan program tersebut.

Adapun tujuan evaluasi menurut Wirawan (2016) dalam (Wahdan Wilsa et al., 2023) yaitu untuk mencapai tujuan yang berbedabeda tergantung dari objek evaluasinya. Target evaluasi tersebut yaitu 1) mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dibuat dan dilakukan sebagai layanan atau intervensi sosial untuk mengatasi masalah, isu, situasi dan kondisi masyarakat. Manfaat program dapat membuat perbedaan dalam masyarakat yang dilayaninya, 2) Penilaian terhadap program apakah sudah dilaksanakan secara terencana. Setiap program direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana tersebut, 3) mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan rancangan dan standar, dan 4) evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang berjalan, mana yang tidak berjalan.

Menurut William N. Dunn (2003) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi adalah penaksiran (*apprisal*), pemberian angka (*rating*), dan (penilaian *assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai.

Dunn (2003) dalam (Sari, 2022) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi antara lain :

- 1) Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya

tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter,nya,

- 2) Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
- 3) Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
- 4) Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompokkelompok yang berbeda dalam masyarakat;
- 5) Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
- 6) Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua

atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Evaluasi menurut Stufflebeam dkk. (1985) merupakan kerangka komprehensif untuk mengarahkan pelaksana evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi dan sistem.

Terdapat empat indikator keberhasilan menurut Stufflebeam, antara lain :

a. Context

Context merupakan langkah pertama dalam penelitian model CIPP yang menjadi dasar dan berkaitan dengan latar belakang, tujuan program, serta strategi dan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Stufflebeam dkk. (1985) menyebutkan bahwa evaluasi context menilai kebutuhan, masalah, aset, dan kesempatan dalam definisi lingkungan.

b. Input

Input Stufflebeam dkk. (1985) menjelaskan bahwa yang dilihat dari input ialah sebagai masukan untuk membantu menyusun suatu program, proyek, atau intervensi lainnya yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada penerima manfaat.

c. Process

Process Stufflebeam dkk. (1985) menjelaskan evaluasi *process* harus mendokumentasikan dan menganalisis biaya usaha, kemudian harus melaporkan bagaimana proses pengamatan dan menilai kualitas peserta.

d. Product

Stufflebeam dkk. (1985) evaluasi *product* mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan baik untuk membantu menjaga proses sesuai dengan trek dan menentukan efektivitas. Penilaian produk melibatkan pengukuran hasil yang diharapkan melalui program (Mustafa and Yokob, 2021). Serta bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai capaian program (Mathison, 2017)

Beragam teori evaluasi program yang ada, namun peneliti memilih menggunakan teori menurut Stufflebeam dkk. (1985) karena teori ini menawarkan model yang komprehensif dan objektif serta praktis. Model ini terdapat empat indikator, yaitu context, input, process, serta product. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat memberikan analisis menyeluruh yang komprehensif mengenai kendala yang dihadapi selama pengembangan program, meningkatkan kualitas serta meningkatkan efektivitas program. Hal ini menjadikan teori Stufflebeam dkk. (1985) sebagai pendekatan yang ideal untuk mengevaluasi pengembangan program yang spesifik di Kabupaten Kepahiang.

2.2.3 Program Lomba Desa Wisata

Program lomba desa wisata adalah inisiatif yang berfokus pada pengembangan potensi pariwisata berbasis masyarakat di tingkat desa. Program ini bertujuan untuk mengubah desa-desa di Indonesia, termasuk Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, menjadi destinasi wisata yang menarik, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dalam implementasinya, lomba desa wisata bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga

menjadi alat pemberdayaan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengelolaan wisata. Desa-desa yang berpartisipasi diajak untuk mengoptimalkan potensi alam, budaya, serta tradisi lokal yang dimiliki, sehingga dapat menciptakan daya tarik wisata yang unik dan berbeda dari destinasi wisata lainnya.

Salah satu aspek utama dari lomba desa wisata adalah pemanfaatan kekayaan alam desa, seperti pegunungan, perkebunan, objek air terjun dan air panas. Potensi alam yang dimiliki desa-desa ini sering kali belum dimanfaatkan secara maksimal dalam sektor pariwisata. Oleh karena itu, lomba desa wisata mendorong desa untuk melakukan konservasi alam sembari mengembangkan daya tarik wisata yang berbasis alam. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi salah satu kriteria utama dalam penilaian lomba, sehingga desa diharapkan dapat mengatur aliran wisatawan tanpa merusak ekosistem yang ada.

Program ini juga menekankan pentingnya pengelolaan budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik utama. Desa-desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepahiang, memiliki objek wisata yang belum banyak diketahui oleh wisatawan luar. Lomba desa wisata memberikan ruang bagi desa untuk menggali, melestarikan, dan mempromosikan kebudayaan lokal mereka.

Program lomba desa wisata, yang diresmikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di pedesaan. Melalui program ini, desa-desa yang selama ini terabaikan potensi wisatanya diajak untuk bertransformasi menjadi destinasi

wisata unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah memberikan dasar hukum bagi pengembangan pariwisata desa di Indonesia.

Kunci keberhasilan program lomba desa wisata terletak pada pendekatan "bottom-up" atau dari level bawah ke level atas, yang menekankan partisipasi aktif masyarakat desa dalam setiap tahapan proses. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai fasilitator, namun juga pendamping dalam mengidentifikasi potensi wisata, merumuskan strategi pengembangan yang lestari, serta membangun kapasitas pengelolaan wisata yang profesional. Program ini mendorong desa untuk melestarikan dan mengintegrasikan alam, budaya, dan keberlangsungan hidup masyarakat dalam setiap aktivitas wisata.

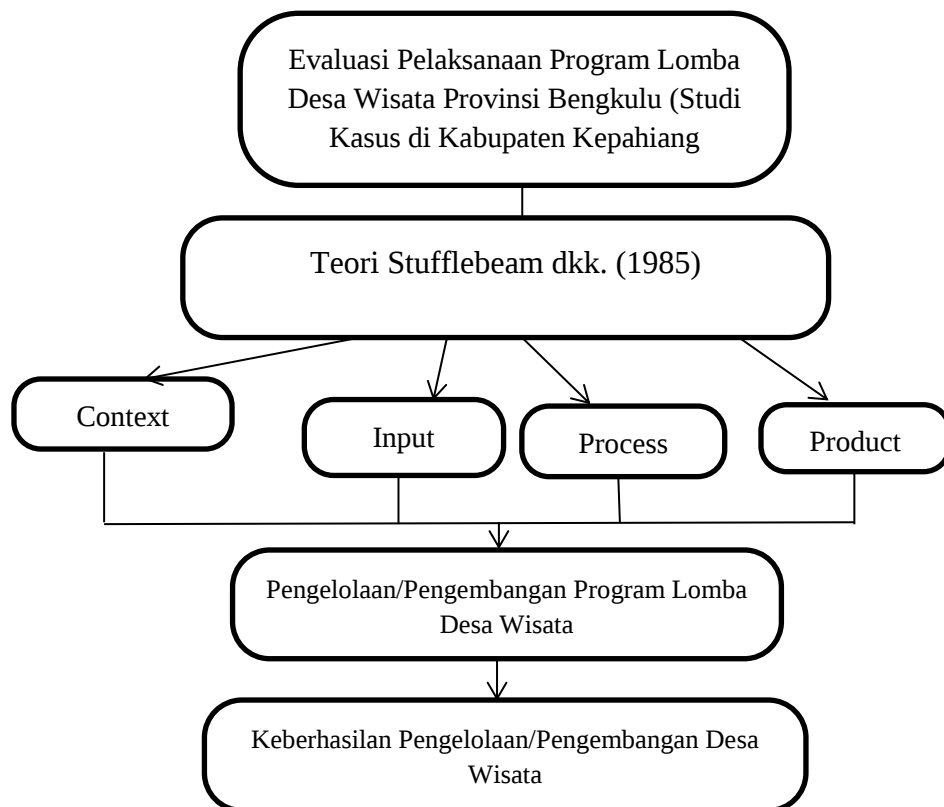
2.3 Kerangka Berfikir

Evaluasi dalam penelitian ini, membahas terkait pengembangan program lomba desa wisata serta aspek yang mendukung program lomba desa wisata Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kepahiang, semua indikasi yang terdapat dalam program lomba desa wisata ini akan dikaji lebih spesifik untuk mendapatkan data yang relevan dan valid dalam program lomba desa wisata ini. Oleh karena itu, penulis menggunakan evaluasi model CIPP yang merupakan salah satu model riset evaluasi yang paling komprehensif untuk mendapatkan semua data yang ada, data-data yang dimaksud telah disusun oleh peneliti dalam suatu kerangka berpikir. Diharapkan dengan telah adanya kerangka berpikir, pada saat proses pengambilan data yang berlangsung tidak keluar dari konteks penelitian yang

ingin dicapai, maka secara sederhana penulis menyajikan bagan kerangka berfikir dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Sumber : Stufflebeam dkk, (1985).